

## Analisis Pemangku Kepentingan Pada Pengelolaan Ekowisata di Siberut Selatan Kepulauan Mentawai, Indonesia

**Myrza Rahmanita\*, Fetty Asmaniaty, Anak Agung Gde Agung, Doni**

**Muhardiansyah, Sri Mariati**  
Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti

\*myrzarahmanita@stptrisakti.ac.id

### Informasi Artikel

Received: 12 Juli 2022

Accepted: 21 Juli 2022

Published: 31 Juli 2022

### Keywords:

Stakeholder Analysis,  
Ecotourism Management,  
Interest and Influence, Siberut  
Mentawai

### Abstract

*South Siberut District on Mentawai Island has great ecotourism potential however its management is not yet optimal, including synergy and connectivity between stakeholders. This research was conducted using stakeholder analysis method and snowball sampling technique with expert judgment. The informants involved were twelve institutions representing four types of stakeholders, namely the Government, Community, Business, and Academics. The objective of this study is to identify stakeholders involved in ecotourism management; to classify and matrix their level of influence and interest. The significance of this research is to increase cooperation between stakeholders through optimizing their respective roles in South Mentawai. This study finds that, Firstly, the importance of government authority in ecotourism management; Secondly, half of all stakeholders have high interest, while the other half show low and very low interest in supporting ecotourism management; Third, half of all stakeholders are Crowd Stakeholders who have the potential to influence the overall management of ecotourism in the future. It is recommended that efforts should be made to inspire as many parties as possible to be involved as stakeholders. Secondly, increasing the competency capacity of human resources through education. Thirdly, synergizing cooperation and collaboration.*

### Kata Kunci:

Analisis Pemangku  
Kepentingan, Pengelolaan  
Ekowisata, Minat dan  
Pengaruh, Siberut Mentawai

### Abstrak

Kabupaten Siberut Selatan di Pulau Mentawai memiliki potensi ekowisata yang besar namun pengelolaannya belum optimal, termasuk sinergi dan konektivitas antar pemangku kepentingan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis stakeholder dan teknik snowball sampling dengan expert judgement. Informan yang terlibat adalah dua belas lembaga yang mewakili empat jenis pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, dan Akademisi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan ekowisata, untuk mengklasifikasikan dan membuat matriks tingkat pengaruh dan minat mereka. Signifikansi penelitian ini adalah untuk meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan melalui optimalisasi peran masing-masing di Mentawai Selatan. Studi ini menemukan bahwa, Pertama, pentingnya kewenangan pemerintah dalam pengelolaan ekowisata; Kedua, separuh dari seluruh pemangku kepentingan memiliki minat yang tinggi, sedangkan separuh lainnya menunjukkan minat yang rendah dan sangat rendah dalam mendukung pengelolaan ekowisata; Ketiga, separuh dari seluruh pemangku kepentingan adalah *Crowd Stakeholder* yang berpotensi mempengaruhi pengelolaan ekowisata secara keseluruhan di masa depan. Direkomendasikan bahwa upaya harus dilakukan untuk menginspirasi sebanyak mungkin pihak untuk terlibat sebagai pemangku kepentingan. Kedua, peningkatan kapasitas kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan. Ketiga, mensinergikan kerjasama dan kolaborasi.

## **PENDAHULUAN**

Kepulauan Mentawai atau yang sejak tahun 1999 dikukuhkan menjadi Kabupaten Kepulauan Mentawai (KKM) merupakan sebuah wilayah geografis kepulauan di bagian barat pulau Sumatera dan dikelilingi Laut Hindia. Merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan ibu kotanya di Tua Peijat, terdiri dari empat pulau besar utama berpenghuni yaitu Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai. Utara dan Pulau Pagai Selatan. Siberut merupakan pulau paling utara dari Kepulauan Mentawai, yang beriklim hutan hujan tropis. Separuh bagian barat pulau Siberut telah ditetapkan menjadi Taman Nasional Siberut pada 1993.

Taman Nasional Siberut (TNS) di Kepulauan Mentawai merupakan salah satu kawasan konservasi ekosistem cagar biosfer yang dilindungi UNESCO (Pristiwasa, 2018). TNS dan desa-desa sekitarnya memiliki potensi pariwisata diantaranya berupa wisata alam seperti rawa dan hutan *mangrove*; wisata budaya seperti tarian, menangkap ikan, pengobatan sikerei, maupun pengolahan sagu (Taman Nasional Siberut, 2021). Budaya asli Mentawai memiliki hubungan yang unik dengan alam sekitarnya sehingga ekowisata merupakan solusi alternatif untuk konservasi hutan di Siberut (Rahmanita et al., 2021).

Ekowisata merupakan bidang pariwisata yang menjembatani praktek ramah lingkungan dan industri pariwisata di seluruh dunia (Ramírez & Santana, 2019). TNS sendiri merupakan hutan dataran rendah dengan potensi ekowisata berupa kekayaan flora fauna endemik. Demikian pula ketiga desa penyangga TNS dalam kajian ini yaitu Muntei, Madobag dan Matotonan, yang keterikatannya kepada hutan hampir tak terpisahkan, kini sedang mengembangkan kegiatan dan paket ekowisata. Oleh karena itu tepatlah jika sejumlah desa di sekitar Taman Nasional

Siberut dikembangkan sebagai kawasan ekowisata antara lain Desa Muntei, Madobag dan Matotonan (Peraturan Daerah Kabupaten Mentawai, 2017). Ketiga desa tersebut, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2018 ditetapkan juga sebagai prioritas pembangunan pariwisata Mentawai, yaitu dalam kawasan pembangunan destinasi pariwisata 3M1K (Madobag, Muntei, Mapadegat dan Katiet).

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan ekowisata di Siberut Selatan menghadapi sejumlah tantangan seperti belum optimalnya sinergisme dan konektivitas antar pemangku kepentingan. Dengan kata lain, kurang efektifnya kolaborasi pemangku kepentingan merupakan penghambat keberhasilan pengelolaan ekowisata di Siberut Selatan. Hal ini tercerminkan dari kurang maksimalnya jumlah wisatawan yang berkunjung dan terkesan tidak stabil pertumbuhannya. Hal mana disebabkan kerjasama antar pemangku kepentingan yang tidak efektif (Pristiwasa, 2018).

Guna menjawab tantangan yang dihadapi, dilakukan studi ini mengenai keterlibatan pemangku kepentingan pada pengelolaan ekowisata di desa sekitar Taman Nasional Siberut, khususnya desa Madobag dan Matotonan di Kecamatan Siberut Selatan, Pulau Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Di negara berkembang, kerjasama atau kolaborasi pemangku kepentingan merupakan faktor utama pembangunan ekowisata berkelanjutan (Wondirad et al, 2020). Setiap pemangku kepentingan memiliki pengaruh dan kepentingannya masing-masing. Keberadaan pemangku kepentingan bergantung pada tingkat pengaruh dan kepentingan yang mereka miliki (Eidt et al., 2020).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) Mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan ekowisata di Siberut Selatan; (2) Mengklasifikasi keberadaan pemangku kepentingan sesuai derajat

tinggi rendahnya pengaruh dan kepentingan mereka; (3) Kategorisasi pemangku kepentingan pengelolaan ekowisata di Siberut Selatan dalam bentuk matriks pengaruh dan kepentingan. Guna mencapai tujuan tersebut, dilakukan penelitian ini menggunakan pendekatan analisis pemangku kepentingan (*stakeholder analysis*).

Penelitian ini penting dilakukan dikarenakan belum ada kajian pengelolaan ekowisata di Siberut Selatan Kepulauan Mentawai menggunakan pendekatan analisis pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan memainkan peran penting, baik sebagai konseptor, regulator, investor, katalisator maupun akselerator. Kajian ini bermanfaat dalam upaya meningkatkan sinergi kerjasama melalui optimalisasi peran masing-masing pemangku kepentingan di Siberut Selatan Kepulauan Mentawai.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengelolaan Ekowisata**

Ekowisata adalah sebuah perjalanan yang bertanggung jawab ke kawasan alam dengan tujuan melestarikan lingkungan, menjaga kesejahteraan masyarakat lokal, dan mendidik wisatawan (*The International Ecotourism Society*, 2018). Ekowisata terkait erat dengan masyarakat lokal,

konservasi keanekaragaman hayati serta perencanaan dan pengelolaan yang tepat (Wondirad, 2017). Ekowisata dengan cepat mendapatkan popularitas sebagai bentuk pengembangan pariwisata alternatif yang akan memajukan ragam tujuan yaitu konservasi dan pembangunan berkelanjutan (Wondirad et al, 2020).

Keberlanjutan pengembangan ekowisata mensyaratkan pengelolaan ekowisata yang efektif, yang terutama tercermin dalam perencanaan ekowisata, pendidikan, pengawasan, kebijakan dan regulasi. Selanjutnya, keberlanjutan pengelolaan ekowisata bergantung pada perlindungan sumber daya, pendidikan publik dan operator, serta perencanaan dan operasi bisnis yang baik. (Xiaoyu & Shuhui, 2020). Pengelolaan ekowisata yang baik berpotensi memberikan dampak positif bagi masyarakat berupa peningkatan lapangan pekerjaan dan peluang usaha ekonomi bagi warga sekitar seperti menjual makanan, minuman, souvenir, menjadi pemandu wisata, atau menyewakan *homestay* kepada para wisatawan. Pengelolaan ekowisata dilakukan dengan melibatkan pemerintah dalam kebijakan, juga masyarakat lokal dalam kegiatan konservasi (Hidayat et al, 2020).

Penelitian terdahulu pengelolaan pariwisata dan pemangku kepentingan disampaikan pada tabel 1 .

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

<b>Penulis</b>	<b>Judul</b>	<b>Pemangku Kepentingan</b>
Siti-Nabiha et al (2015)	<i>Tourism planning and stakeholders' engagements: the case of Penang Island.</i>	Pemerintah Asosiasi industri Komunitas
Vrontis et al (2021)	<i>Sustainable Development in Tourism: A Stakeholder Analysis of the Langhe Region</i>	Wiraswasta lokal Keluarga Pegawai industri wisata Petani lokal Penyedia layanan lokal Komunitas
Li et al (2020)	<i>Heritage tourism stakeholder conflict: a case of a World Heritage Site in China</i>	Pemerintah, Penduduk lokal Wisatawan
Amoako et al (2022)	<i>Stakeholder role in tourism</i>	Pegawai industri wisata

Penulis	Judul	Pemangku Kepentingan
	<i>sustainability: the case of Kwame Nkrumah Mausoleum and centre for art and culture in Ghana</i>	Pemerintah
		Masyarakat
		Swasta
		Pemilik toko cinderamata

Sumber: Peneliti (2021)

*State of the art* dari penelitian ini adalah menggunakan pendekatan analisis pemangku kepentingan dalam mengkaji pengelolaan ekowisata di TNS. Penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu yaitu melibatkan Akademisi selain tipe pemangku kepentingan lain yaitu Pemerintah, Bisnis, maupun Komunitas atau Masyarakat. Lebih lanjut, studi pengelolaan ekowisata ini mengkaji menggunakan perspektif pengaruh dan kepentingan dari para pemangku kepentingan tersebut. Penelitian ini juga signifikan berbeda dari lainnya karena dilakukan di kawasan ‘*indigenous*’ yaitu di Siberut Selatan yang terletak di Kepulauan Mentawai. Studi-studi terdahulu tentang pengelolaan ekowisata yaitu Wiharso, et al (2020) menggunakan pendekatan daya dukung ekosistem dan persepsi masyarakat untuk meneliti tentang pengelolaan ekowisata mangrove di Kepulauan Riau. Marlina, et al (2020) menggunakan pendekatan konservasi berdasarkan lokal wisdom masyarakat di Taman Nasional Wakatobi.

### **Pemangku Kepentingan pada Pengelolaan Ekowisata**

Pemangku kepentingan adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi pencapaian tujuan organisasi (Freeman, 2010), memiliki perhatian dan atau pengaruh terhadap hasil suatu kegiatan (Melo et al. 2019). Pemangku kepentingan bisa berupa pemerintah ataupun swasta dalam masyarakat sebagai kelompok yang terorganisir untuk kepentingan mereka (Melo et al, 2019). Krce, et al (2016) menyebutkan bahwa pemangku kepentingan yang beragam memiliki berbeda tujuan dan

kepentingan dan aktivitas, yang mempengaruhi keberlangsungan (*sustainability*).

Keberadaan pemangku kepentingan dan kerjasama antar pemangku kepentingan merupakan kunci utama keberhasilan penerapan dan pengelolaan ekowisata (Salman et al, 2021). Dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan, pemangku kepentingan berpeluang memberikan kemakmuran sosial ekonomi (Hieu & Rašovská, 2018). Penelitian ini berbeda dari kajian terdahulu yaitu menambahkan unsur pemangku kepentingan keempat, yaitu Akademik. Penelitian terdahulu oleh Nabih & Saad (2015) menggunakan pendekatan Triple Helix, yang menyampaikan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan dikonstruksikan oleh tiga pemangku kepentingan yaitu pemerintah, industri (bisnis) dan komunitas. Ragam pemangku kepentingan, menurut Rahmanita (2019) merupakan model pengembangan sosial ekonomi yang mendorong inovasi dan kewirausahaan melalui kolaborasi dan kemitraan yang menguntungkan. Hal mana menurut Lagarensse, dkk. (2018) sebagai strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan untuk mendukung target pengembangan pariwisata.

Hubungan pemangku kepentingan dipahami sebagai seperangkat interaksi yang tidak seragam antar pelaku sektor pariwisata di suatu destinasi tertentu (Pulido & Merinero, 2018). Interaksi pemangku kepentingan penting karena interaksi ini menunjukkan bagaimana mereka dapat mempengaruhi atau dipengaruhi (Vrontis et al, 2021). pemangku kepentingan membangun berbagai jenis

hubungan dan interaksi menyesuaikan keadaan. Bentuknya bisa persaingan, kerja sama, atau persaingan dan kerjasama secara bersamaan (Wondirad et al, 2020).

Setiap pemangku kepentingan memiliki peran dan fungsi yang berbeda yang perlu dipahami agar pengembangan wisata di suatu daerah dapat terwujud dengan baik (Woo et al, 2016). Keberhasilan kerjasama pemangku kepentingan dalam pengelolaan ekowisata di Polandia bagian Selatan dapat ditemukan dalam studi Czernek (2013), Graci (2013) di Gili Trawangan (Indonesia), Temuan studi Yodsuwan & Butcher (2012) menunjukkan bahwa kerjasama membantu memaksimalkan hasil kolektif destinasi berupa kontribusi setiap pemangku kepentingan dalam pengembangan ekowisata yang berkelanjutan. Eksistensi organisasi akan memudar atau hilang tanpa dukungan pemangku kepentingan (Marzuki & Hay, 2016). Tidak adanya kolaborasi dan kemitraan pemangku kepentingan yang efektif dan tata kelola yang buruk merupakan penyebab kegagalan ekowisata (Wondirad et al, 2020).

### **Analisis Pemangku Kepentingan pada Pengelolaan Ekowisata**

Identifikasi, klasifikasi dan eksplorasi pemangku kepentingan kerap dilakukan menggunakan analisis pemangku kepentingan (*stakeholder analysis*). Analisis pemangku kepentingan merupakan serangkaian proses meliputi: (1) mengidentifikasi siapa pemangku kepentingan; (2) merefleksikan hubungan antar pemangku kepentingan dan mengembangkan potensi koalisi; serta (3) merepresentasikan pengaruh dan kepentingan dari para pemangku kepentingan (Ackerman & Eden, 2011).

Identifikasi pemangku kepentingan dilakukan menggunakan pemetaan pemangku kepentingan, yaitu suatu cara untuk menentukan siapa

diantara pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh paling positif atau negatif terhadap suatu upaya atau siapa yang paling mungkin terpengaruh oleh upaya tersebut sehingga strategi keterlibatan yang tepat dapat diidentifikasi untuk intervensi di masa mendatang (Ginige, dkk. 2018).

Sejumlah pemangku kepentingan yang telah diidentifikasi, selanjutnya diklasifikasi menggunakan pendekatan pengaruh (*power*) dan kepentingan (*interest*). Para pemangku kepentingan dapat diklasifikasikan secara berbeda dari perbedaan tinggi rendahnya dimensi pengaruh (*power*) dan kepentingan (*interest*) mereka tersebut. Berdasarkan perbedaan tingkatan kedua dimensi tersebut (pengaruh dan kepentingan), pemangku kepentingan diklasifikasi atas empat yaitu *player*, *context setter*, *subject* dan *crowd* (Ackerman & Eden, 2011; Eidt et al., 2020).

Berikutnya adalah presentasi pengaruh dan kepentingan dari para pemangku kepentingan. Yang dimaksud dengan pengaruh (*power*) adalah kekuatan pemangku kepentingan mempengaruhi atau membuat kebijakan maupun peraturan-peraturan dalam pengelolaan ekowisata. Pengaruh (*power*) memiliki tiga dimensi yaitu pengkondisian, kompensasi dan kelayakan. Pengaruh juga memiliki tiga instrumen sumber yaitu organisasi, kepribadian (individu) dan properti. Sedangkan kepentingan (*interest*) adalah dukungan pemangku kepentingan dalam pengelolaan ekowisata. Kepentingan merujuk pada kebutuhan pemangku kepentingan dalam pencapaian tujuan (*out put*) (Reed et al, 2009).

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Analisis Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Analysis*) terdiri dari serangkaian perangkat penelitian yang mencakup teknik kuantitatif dan kualitatif untuk menguji para partisipan. Analisis Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Analysis*) adalah

metodologi penelitian yang teliti yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai pentingnya kelompok individu atau lembaga kunci yang berpeluang memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan proyek penelitian. Sebagai metodologi penelitian, analisis pemangku kepentingan memetakan posisi individu atau lembaga berikut pengaruh mereka, serta kemungkinan kelompok lain mempengaruhi mereka. Ini membantu peneliti untuk menentukan kepentingan kelompok atau individu tertentu dalam hasil penelitian yang diberikan. Analisis pemangku kepentingan juga dapat digunakan sebagai alat untuk melibatkan berbagai kelompok guna membangun hubungan, ataupun kerjasama (kolaborasi) satu sama lain (Daniel & Horsburg, 2009).

### **Analisis Data**

Langkah pertama dalam analisis pemangku kepentingan adalah mengembangkan masalah penelitian, yang dalam hal ini adalah belum optimalnya sinergisme dan konektivitas antar pemangku kepentingan. Langkah ini dilanjutkan dengan mengidentifikasi pemangku kepentingan. Populasi, dalam hal ini adalah individu-individu yang menjadi narasumber merepresentasikan lembaga-lembaga yang secara khusus terlibat secara langsung dalam, maupun tidak langsung dengan pengelolaan ekowisata di Siberut Selatan, mewakili empat unsur pemangku kepentingan di tingkat Daerah (Kabupaten) maupun Lokal (Desa), adalah Pemerintah, Bisnis, Komunitas atau masyarakat, dan Akademik.

Penentuan responden dilakukan menggunakan teknik bola salju (*snow ball sampling technique*) dimana narasumber ditentukan berdasarkan informasi dari responden terdahulu tentang narasumber lain yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan ekowisata Siberut Kepulauan Mentawai. Dikarenakan lokus penelitian yang cukup 'remote' dan sulit dijangkau, serta

waktu dan sarana transportasi antar kawasan yang cukup terbatas, *expert judgement* sangat penting dalam memilih narasumber yang paling sesuai yang memiliki keterwakilan dengan topik studi sebagai ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sampel Penelitian

<b>Pemangku Kepentingan</b>	<b>Jumlah Lembaga</b>
Pemerintah	4
Bisnis	2
Akademik	1
Komunitas	5
<b>Total</b>	<b>12</b>

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian (2020)

Keduabelas responden lembaga yang menjadi sampel dalam penelitian tentang pengelolaan ekowisata di Siberut Selatan Kepulauan Mentawai ini adalah: 1) Pemangku kepentingan Pemerintah direpresentasikan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai (Disparbudpora KKM), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai (Bappeda KKM), Balai Taman Nasional Siberut (BTNS), dan Pemerintah Desa (Pemdes) Muntei; 2) Pemangku kepentingan Bisnis terdiri dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Muntei, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rereiket Indah Desa Madobag; 3) Pemangku kepentingan Komunitas memiliki keterwakilan Yayasan Pendidikan Budaya Mentawai (YPBM) Muntei, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Muntei, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Matotonan, Lembaga Kerapatan Adat Matotonan, serta Karang Taruna Matotonan; selanjutnya 4) Pemangku kepentingan Akademik yang berhasil dijumpai di lapangan adalah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Barat (STKIP PGRI Sumbar).

Langkah selanjutnya adalah memperoleh pemahaman yang jelas atas potensi peran dan kontribusi para narasumber pemangku kepentingan, yang selanjutnya diklasifikasi berdasarkan tinggi rendahnya pengaruh

serta dukungan yang mencerminkan kepentingan mereka terkait pengelolaan ekowisata di Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana disampaikan melalui Tabel 2.

Tabel 2. Ukuran Pengaruh dan Kepentingan Pemangku Kepentingan

Skor	Nilai	Kriteria	Keterangan
<b>Pengaruh Pemangku Kepentingan</b>			
5	21-25	Sangat Tinggi	Sangat mempengaruhi pengelolaan ekowisata
4	16-20	Tinggi	Mempengaruhi pengelolaan ekowisata
3	11-15	Cukup Tinggi	Cukup mempengaruhi pengelolaan ekowisata
2	6-10	Kurang Tinggi	Kurang mempengaruhi pengelolaan ekowisata
1	0-5	Rendah	Tidak mempengaruhi pengelolaan ekowisata
<b>Kepentingan Pemangku Kepentingan</b>			
5	21-25	Sangat Tinggi	Sangat mendukung pengelolaan ekowisata
4	16-20	Tinggi	Mendukung pengelolaan ekowisata
3	11-15	Cukup Tinggi	Cukup mendukung pengelolaan ekowisata
2	6-10	Kurang Tinggi	Kurang mendukung pengelolaan ekowisata
1	0-5	Rendah	Tidak mendukung pengelolaan ekowisata

Sumber: Alviya, et al (2016)

Kajian selanjutnya adalah melakukan identifikasi dan klasifikasi masing-masing pemangku kepentingan pengelolaan ekowisata Siberut Selatan Kepulauan Mentawai berdasarkan pengaruh dan kepentingannya secara bersamaan disajikan dalam bentuk matriks. Berdasarkan pengaruh dan kepentingan (Ackerman & Eden, 2011; Eidt et al., 2020) mengkategorikan pemangku kepentingan menjadi 4 (empat), yaitu: (1) *Player* (pemain utama) adalah pemangku kepentingan yang mempunyai pengaruh tinggi serta kepentingan tinggi dalam pengelolaan kegiatan; (2) *Subject* (subyek) adalah pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan yang tinggi tetapi pengaruhnya rendah; (3) *Context setter* (penentu konteks) memiliki pengaruh yang tinggi tetapi sedikit kepentingan; dan (4) *Crowd* (kerumunan) merupakan pemangku kepentingan yang memiliki sedikit pengaruh dan kepentingan yang rendah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Identifikasi Pemangku Kepentingan

Pengelolaan ekowisata di Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai melibatkan setidaknya dua belas pelaku kepariwisataan yang terdiri dari unsur pemerintah, bisnis, akademik dan masyarakat. Merujuk pemikiran Nabaha & Saad (2015), bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan dikontribusikan oleh tiga pemangku kepentingan yaitu pemerintah, bisnis, dan komunitas, maka kedua belas pelaku kepariwisataan tersebut diidentifikasi sebagai salah satu dari ketiga pemangku kepentingan, yaitu sebagai disajikan melalui Tabel 3.

Tabel 3. Pemangku Kepentingan pada Pengelolaan Ekowisata di Siberut Selatan  
Kabupaten Kepulauan Mentawai (KKM)

No	Pemangku Kepentingan	Keterangan
1.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai (Disparbudpora KKM)	Pemerintah
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai (Bappeda KKM)	Pemerintah
3.	Balai Taman Nasional Siberut (BTNS)	Pemerintah
4.	Pemerintah Desa Muntei	Pemerintah
5.	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Muntei	Bisnis
6.	Yayasan Pendidikan Budaya Mentawai (YPBM) Muntei	Komunitas
7.	Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Muntei	Komunitas
8.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Matotonan	Komunitas
9.	Karang Taruna Matotonan	Komunitas
10.	Lembaga Kerapatan Adat Matotonan	Komunitas
11.	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rereiket Indah Desa Madobag	Bisnis
12.	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Barat (STKIP PGRI Sumbar)	Akademik

Sumber: Peneliti (2021)

Merujuk Tabel 3, pemangku kepentingan pengelolaan ekowisata di Siberut Selatan, teridentifikasi terdiri dari 4 unsur pemangku kepentingan Pemerintah, 2 unsur pemangku kepentingan Bisnis, 5 unsur Komunitas dan 1 pemangku kepentingan Akademik. Pertama, pemangku kepentingan Pemerintah adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai (Disparbudpora KKM), Balai Taman Nasional Siberut (BTNS), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai (Bappeda KKM) dan Pemerintah Desa (PemDes) Muntei. Kedua, pemangku kepentingan Bisnis yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rereiket Indah Desa Madobag, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Muntei; Ketiga, pemangku kepentingan Komunitas adalah Yayasan Pendidikan Budaya Mentawai (YPBM) Muntei, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Muntei, Lembaga Kerapatan Adat (LKA) Matotonan, Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat (LPM) Matotonan, dan Karang Taruna (KT) Matotonan. Terakhir, unsur pemangku kepentingan Akademik yaitu Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Barat (STKIP PGRI Sumbar).

#### **Klasifikasi Pemangku Kepentingan**

Pemangku kepentingan pengelolaan ekowisata di Siberut Selatan, Kepulauan Mentawai, diklasifikasi menurut tingkat pengaruh dan kepentingan sebagai ditunjukkan melalui Tabel 4. Pengukuran tingkat pengaruh dilakukan menggunakan lima dimensi yang meliputi kekuatan kondisi, kekuatan kompensasi, kekuatan organisasi, kekuatan individu, dan kekuatan kelayakan. Sedangkan pengukuran tingkat kepentingan menggunakan lima dimensi yaitu bentuk keterlibatan, program kerja, bentuk kewenangan, tingkat ketergantungan, serta manfaat yang diperoleh (Bryson et al, 2011).



Tabel 4. Nilai Pengaruh dan Kepentingan Para Pemangku Kepentingan pada Pengelolaan Ekowisata di Siberut Selatan Kepulauan Mentawai

No	Pemangku Kepentingan	Pengaruh	Kepentingan
1.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai (Disparbudpora KKM)	16	21
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai (Bappeda KKM)	8	14
3.	Balai Taman Nasional Siberut (BTNS)	17	13
4.	Pemerintah Desa (PemDes) Muntei	11	9
5.	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Muntei	7	5
6.	Yayasan Pendidikan Budaya Mentawai (YPBM) Muntei	13	16
7.	Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Muntei	8	12
8.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Matotonan	5	5
9.	Karang Taruna (KT) Matotonan	5	5
10.	Lembaga Kerapatan Adat (LKA) Matotonan	9	5
11.	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rereiket Indah Desa Madobag	9	8
12.	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Barat (STKIP PGRI Sumbar)	10	14

Sumber: Peneliti (2021)

Klasifikasi tingkat pengaruh (*power*) pemangku kepentingan pengelolaan ekowisata di Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai dilakukan merujuk Alviya, et al (2016). Dari tabel 4, ditemukan bahwa tidak ada pemangku kepentingan yang sangat mempengaruhi pengelolaan ekowisata (Nilai 21-25 atau Pengaruh Sangat Tinggi). Di peringkat kedua, kelompok pemangku kepentingan yang mempengaruhi pengelolaan ekowisata (Nilai 16-20 atau Pengaruh Tinggi) adalah representasi Pemerintah yaitu Balai Taman Nasional Siberut (BTNS) dan Disparbudpora KKM. Selanjutnya, sejumlah pemangku kepentingan yang cukup mempengaruhi pengelolaan ekowisata (Nilai 11-15 atau Pengaruh Cukup Tinggi) adalah unsur komunitas dan pemerintah yaitu YPBM Muntei dan PemDes Muntei. Delapan pemangku kepentingan lainnya terklasifikasi sebagai kurang mempengaruhi pengelolaan ekowisata secara berturut-

turut adalah STKIP PGRI Sumbar, LKA Matotonan, BUMDes Madobag, Bappeda KKM, HPI Muntei, serta BUMDes Muntei. Dan akhirnya, pemangku kepentingan yang tidak mempengaruhi pengelolaan ekowisata, keduanya adalah unsur komunitas yaitu LPM Matotonan dan Karang Taruna Matotonan.

Klasifikasi tingkat kepentingan (*interest*) pemangku kepentingan pengelolaan ekowisata di Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai dibedakan merujuk Alviya, et al (2016). Dari tabel 4, ditemukan bahwa satu-satunya pemangku kepentingan yang khususnya berkepentingan sangat tinggi dalam artian sangat mendukung pengelolaan ekowisata di Siberut Selatan (Nilai 21-25 atau Kepentingan Sangat Tinggi) adalah unsur Pemerintah terkait yaitu Disparbudpora KKM. Di kelompok pemangku kepentingan yang mendukung pengelolaan ekowisata (Nilai 16-20 atau Kepentingan Tinggi)

satu-satunya adalah representasi komunitas yaitu YPBM Muntei. Lebih lanjut, para pemangku kepentingan yang cukup mendukung pengelolaan ekowisata (Nilai 11-15 atau Kepentingan Cukup Tinggi) adalah unsur-unsur pemerintah dan komunitas yaitu Bappeda KKM, STKIP PGRI Sumbar, BTNS, dan HPI Muntei. Dua pemangku kepentingan yang terklasifikasi sebagai kurang mendukung pengelolaan ekowisata (Nilai 6-10 atau Kepentingan Kurang Tinggi) adalah unsur Pemerintah yaitu PemDes Muntei dan bisnis yaitu BUMDes Madobag. Sedangkan yang terklasifikasi tidak mendukung pengelolaan ekowisata (Nilai 0-5 atau Kepentingan Rendah), adalah empat pemangku kepentingan yang merepresentasikan masyarakat dan bisnis masyarakat yaitu LPM Matotonan, LKA Matotonan, dan Karang Taruna Matotonan; serta BUMDes Muntei.

### **Matriks Pengaruh dan Kepentingan Pemangku Kepentingan**

Matriks dari para pemangku kepentingan ditampilkan melalui empat kwadran pada Gambar 1. Masing-masing kwadran merepresentasikan tinggi rendahnya pengaruh dan kepentingan para pemangku kepentingan yang mempengaruhi pengelolaan dan keberlanjutan pengelolaan ekowisata. Kuadran I memetakan para Pemangku Kepentingan *PLAYER* yang memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi. Kuadran II memetakan para Pemangku Kepentingan *SUBJECT* yang memiliki kepentingan tinggi sementara pengaruhnya rendah. Kuadran III adalah para Pemangku Kepentingan *CONTEXT SETTER* yang memiliki pengaruh tinggi namun kepentingan rendah. Dan akhirnya, Kuadran IV memetakan para Pemangku Kepentingan *CROWD* yang bukan saja memiliki pengaruhnya rendah namun kepentingannya juga rendah.

Dari hasil olah data matriks

pengaruh dan kepentingan pengelola ekowisata di Siberut Selatan terlihat pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai (KKM) yang berperan sebagai *Player* adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai (Disparbudpora KKM) dan Balai Taman Nasional Siberut (BTNS). Hal ini merupakan preseden baik karena ekowisata merupakan penggabungan unsur wisata di alam bebas, khususnya di tiga desa wisata sebagai lokus kajian, yang dalam hal ini menjadi tanggungjawab Disparbudpora KKM; dengan unsur lingkungan, khususnya di sekitar Taman Nasional, dalam hal ini terwakilkan dari keberadaan BTNS. Pemangku kepentingan yang merupakan *Player* di urutan ketiga adalah Yayasan Pendidikan Budaya Mentawai (YPBM). Besarnya pengaruh *player* sebagai pemangku kepentingan yang paling aktif digambarkan Ackerman & Eden (2011) bahwa *player* (pemain utama) memungkinkan untuk mendukung atau sebaliknya menggagalkan suatu kegiatan pariwisata karena pengaruh dan kepentingannya yang tinggi.

Sebagai penguatan dalam pengelolaan dan pengembangan ekowisata, ketiga pemangku kepentingan *player* menempatkan pendidikan terhadap komunitas sebagai penguatan pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan. Langkah ini merupakan langkah strategis menjaga ekowisata berkelanjutan sebagaimana penelitian Dabphet (2012) bahwa pendidikan terlibat dalam memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pariwisata dan pengembangan pariwisata (ekowisata) berkelanjutan melalui komunitas. Kegiatan pendidikan ini juga merupakan kegiatan yang berpotensi menambah pengaruh (*power*). Pemangku kepentingan *player* ini penting untuk mendapatkan perhatian dalam pengelolaan ekowisata di Siberut Selatan karena menentukan keberhasilan

pengelolaan ekowisata.

<b>KEPENTINGAN</b>	<b>TINGGI</b>	<b>SUBJECT (KWADRAN II)</b> 1. STKIP PGRI Sumbar 2. Bappeda KKM 3. HPI Muntei	<b>PLAYER (KWADRAN I)</b> 1. Disparbudpora KKM 2. Balai TNS 3. YPBM Muntei
	<b>RENDAH</b>	<b>CROWD (KWADRAN IV)</b> 1. BUMDes Madobag 2. LKA Matotonan 3. BUMDes Muntei 4. LPM Matotonan 5. Karang Taruna Matotonan	<b>CONTEXT SETTER (KWADRAN III)</b> 1. Pem. Des. Muntei
		<b>RENDAH</b>	<b>TINGGI</b>

Gambar 1. Matriks Pengaruh dan Kepentingan Pemangku Kepentingan

Pada Kuadran II ditemukan Pemangku Kepentingan *Subject* yang mendukung dan memiliki kepentingan tinggi serta pengaruh rendah dalam pengelolaan ekowisata, terdiri dari STKIP PGRI Sumbar, Bappeda KKM, dan HPI Muntei. Pemangku kepentingan subjek dalam pengelolaan ekowisata lebih bersifat mendukung player dan memiliki kapasitas yang kecil dalam mengubah situasi Bappeda KKM memiliki kepentingan tinggi namun kurang memiliki pengaruh dalam pengelolaan ekowisata di Siberut Selatan. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya keterlibatan operasional Bappeda dalam pengembangan ekowisata. Kondisi ini tidak terlepas dari kaitan dengan tugas dan kewenangan Bappeda yang adalah pada tingkat perencanaan. Jika pun mengkait pengelolaan ataupun pengembangan ekowisata, maka tetap pada tatanan perencanaan daerah, bukan pada operasional pengorganisasian. Bappeda KKM perlu terus mendukung ekowisata di Siberut Selatan. Dengan kata lain, dipertahankan memiliki kepentingan tinggi, dikarenakan pengelolaan ataupun pengembangan ekowisata di Siberut Selatan memerlukan otoritas pemerintah daerah. Hal ini sejalan temuan Dabphet, et al (2012) di Pulau Kret, Thailand yang menyebutkan pentingnya otoritas pemerintah daerah dalam pelaksanaan

pengembangan pariwisata berkelanjutan. Ketiga pemangku kepentingan *Subject* tersebut, baik STKIP PGRI Sumbar, Bappeda KKM maupun HPI Muntei terlihat kurang memiliki pengaruh secara operasional pengelolaan maupun pengembangan ekowisata. Jika pun memiliki kemampuan mempengaruhi namun kapasitasnya kecil. Pemangku kepentingan ini dapat memberi pengaruh terhadap pemangku kepentingan lain. Sebaliknya, pemangku kepentingan *subject* dapat dipengaruhi oleh pemangku kepentingan lain jika pemangku kepentingan lain tersebut membentuk aliansi (Ackerman & Eden, 2011; Bryson, dkk., 2011).

Pada Kuadran III ditemukan Pemangku Kepentingan *CONTEXT SETTER* yang mendukung dan memiliki kepentingan rendah serta pengaruh tinggi dalam pengelolaan ekowisata, dalam hal ini adalah Pemerintah Desa Muntei. Pemangku kepentingan *context setter* memiliki tingkat kekuasaan yang tinggi terhadap masa depan. Pemangku kepentingan *context setter* dalam pengelolaan ekowisata di Siberut Selatan adalah Pemerintah Desa Muntei yang memiliki pengaruh cukup tinggi namun masih belum maksimal perannya dalam mendukung pengelolaan ekowisata. Kepentingan Pemerintah Desa masih terasa rendah dikarenakan belum terlalu merasa memiliki ketergantungan

pendapatan dari ekowisata. Lebih lanjut, belum optimalnya dukungan Pemerintah Desa terhadap pengelolaan ekowisata Siberut Selatan adalah disebabkan keterbatasan sumber daya manusia yang selanjutnya berdampak tidak maksimalnya dorongan keterlibatan mereka dalam pengelolaan kepariwisataan, khususnya ekowisata Siberut Selatan. Untuk memaksimalkan peran Pemerintah Desa Muntei dalam pengelolaan ekowisata merujuk pada Bryson, et al (2011) perlu dilakukan evaluasi terhadap kepentingannya karena pemangku kepentingan context setter cenderung bisa menjadi penghalang karena tidak memiliki kepentingan.

Pemangku kepentingan dalam penelitian terbanyak ditemukan pada Kuadran IV yaitu Pemangku Kepentingan *CROWD* yang mendukung dan memiliki kepentingan rendah serta pengaruh rendah dalam pengelolaan ekowisata, terdiri dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rereiket Indah Madobag, Lembaga Kerapatan Adat (LKA) Matotonan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Muntei, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Matotonan, dan Karang Taruna Matotonan. Hal ini selain rendahnya pengaruh pemangku kepentingan namun disebabkan para pemangku kepentingan tersebut belum terlibat secara *langsung* dalam kegiatan ekowisata. Guna menguatkan dukungan pemangku kepentingan *CROWD* perlu dilakukan sosialisasi dan kesadaran (*awareness*) terkait kepariwisataan ataupun ekowisata. Hal lain adalah dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Nabiha & Saad (201) menunjukkan bahwa proses keterlibatan pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata di Kepulauan Penang antara lain pemerintah, asosiasi industri dan komunitas masyarakat. Kemudian

penelitian yang dilakukan oleh Vrontis et al (2021) menunjukkan bahwa stakeholder terlibat dalam pariwisata berkelanjutan di Lange Region meliputi pengusaha lokal, keluarga, pegawai industri wisata, petani lokal, penyedia layanan lokal, dan komunitas masyarakat. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Li et al (2017) menunjukkan pemangku kepentingan pada wisata budaya di Cina yaitu pemerintah, penduduk lokal dan wisatawan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Amoaka et al (2021) menunjukkan bahwa pemangku kepentingan dalam industri pariwisata dan perhotelan di Mausoleum Kwame Nkrumah dan pusat seni dan budaya di Ghana terdiri dari pegawai industri wisata, pemerintah, masyarakat, swasta dan pemilik toko cinderamata.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Identifikasi terhadap pemangku kepentingan pengelolaan ekowisata di Siberut Selatan Kepulauan Mentawai pada saat penelitian dilakukan menunjukkan 12 lembaga yang merepresentasikan empat unsur pemangku kepentingan yaitu diwakili oleh 4 unsur pemangku kepentingan Pemerintah, 2 unsur pemangku kepentingan Bisnis, 5 unsur Komunitas dan 1 pemangku kepentingan Akademik. Pemangku kepentingan yang berada di urutan teratas memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi adalah unsur Pemerintah yaitu Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai (Disparbudpora KKM) 37 serta Balai Taman Nasional Siberut (BTNS) 30. Yayasan Pendidikan Budaya Mentawai (YPBM) Muntei 29, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Barat (STKIP PGRI Sumbar) 24, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai (Bappeda KKM) 22. Sementara

Pemerintah Desa (PemDes) Muntei 20, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Muntei 20, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rereiket Indah Desa Madobag 17, Lembaga Kerapatan Adat (LKA) Matotonan 14, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Muntei 12, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Matotonan 10, Karang Taruna (KT) Matotonan 10.

Pengelolaan ekowisata di Siberut Selatan, Kepulauan Mentawai pada saat ini terutama ditentukan oleh tiga *players* yang mewakili dua unsur pemangku kepentingan utama yaitu Pemerintah dan masyarakat. Unsur pemerintah yaitu Dinas Pariwisata, Budaya dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Mentawai (Disparbudpora KKM) dan Balai Taman Nasional Siberut (BTNS). Player dari unsur komunitas adalah Yayasan Pendidikan Budaya Mentawai Muntei (YPBM Muntei). Dapat disimpulkan bahwa dinamika, keberlangsungan dan keberlanjutan pengelolaan ekowisata Siberut Selatan lebih banyak digerakkan oleh ketiga lembaga tersebut. Sedangkan para pemangku kepentingan lain secara berurutan berfungsi sebagai pendukung.

Klasifikasi pemangku kepentingan pengelolaan ekowisata di Siberut Selatan berdasarkan tinggi rendahnya pengaruh dan kepentingan mereka, adalah tidak ada pemangku kepentingan yang sangat berpengaruh. Namun berita baiknya adalah pemangku kepentingan yang sangat mengkait ekowisata, yaitu Balai Taman Nasional Siberut dan Disparbudpora KKM, yang keduanya dari unsur pemerintah memiliki pengaruh yang tinggi. Sedangkan pemangku kepentingan lokal yaitu YPBM Muntei dan PemDes Muntei memiliki pengaruh yang cukup tinggi. Sementara dua pertiga atau lebih dari 60 persen dari keseluruhan responden memiliki pengaruh yang rendah dan sangat rendah. Dari sisi kepentingan (*interest*), yang tertinggi adalah Disparbudpora KKM, diikuti yang tinggi adalah YPBM Muntei,

sementara yang cukup tinggi adalah Bappeda KKM, STKIP PGRI Sumbar, BTNS, dan HPI Muntei. Separuh dari total keseluruhan responden menunjukkan dukungan yang rendah dan sangat rendah terhadap pengelolaan ekowisata di Siberut Selatan. Adanya beberapa pemangku kepentingan yang memiliki kesamaan dalam bidang kegiatan sektor kepariwisataan memberi peluang untuk dapat bersinergi dalam pengelolaan ekowisata di Siberut Selatan. Namun belum optimalnya kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia dari sejumlah pemangku kepentingan memerlukan upaya *upgrading* yang sinergis untuk dapat memenuhi kerjasama dan standar dipersyaratkan.

Dari eksplorasi atas pemangku kepentingan utama (*PLAYER*) dalam artian memiliki pengaruh dan kepentingan tinggi dalam pengelolaan ekowisata Siberut Selatan adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai (Disparbudpora KKM), Balai Taman Nasional Siberut (BTNS) dan Yayasan Pendidikan Budaya Mentawai (YPBM). Lebih lanjut, ketiga pemangku kepentingan utama ini menempatkan pendidikan komunitas guna menguatkan keberlanjutan pengelolaan ekowisata.

### **Saran**

Saran pertama yang diberikan adalah untuk melibatkan sebanyak mungkin pihak-pihak untuk terlibat sebagai pemangku kepentingan pengelolaan ekowisata di Siberut Selatan Kepulauan Mentawai. Perlu dilakukan upaya-upaya menginspirasi para pihak untuk memberikan dukungan terhadap pengelolaan ekowisata di Siberut Selatan, diantaranya dengan melakukan sosialisasi terkait kepariwisataan dan khususnya ekowisata serta potensi yang dimiliki Kepulauan Mentawai yang selanjutnya mensyaratkan keterlibatan para pemangku kepentingan guna memastikan optimalisasi dan

keberlanjutan pengelolaan ekowisata.

Saran kedua diberikan terkait optimalisasi pengaruh dan kepentingan para pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Untuk pemangku kepentingan *Subject*, dalam penelitian ini adalah STKIP PGRI Sumbar, Bappeda KKM dan HPI Muntei perlu lebih meningkatkan pengaruh dalam pengelolaan ekowisata di Siberut Selatan. Untuk pemangku kepentingan *Context Setter* yaitu Pemerintah Desa Muntei, perlu lebih meningkatkan dukungan (kepentingan) nya. Terlebih pemangku kepentingan *Crowd* yang jumlahnya terbanyak, dalam hal ini adalah BUMDes Madobag, LKA Matotonan, BUMDes Muntei, LPM Matotonan dan Karang Taruna Matotonan, perlu meningkatkan dukungan sekaligus memberikan maupun menguatkan pengaruh atas pengelolaan ekowisata di Siberut Selatan. Rendah atau tidak terlibatnya pemangku kepentingan *Crowd* berpotensi memengaruhi konteks keseluruhan termasuk menurunnya kualitas pengelolaan ekowisata di masa depan karena tantangan terkendalanya kerjasama dengan pemangku kepentingan lain. Oleh karena itu perlu peningkatan kesadaran dan pengembangan kepentingan serta mengubah pemangku kepentingan *crowd* ini menjadi *Player*.

Secara umum, guna meningkatkan menjadi *Player* dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman serta kesadaran (*awareness*) akan pentingnya peran mereka dalam pengelolaan ekowisata di Siberut Selatan. Selain itu juga dengan meningkatkan kapasitas kompetensi sumber daya manusia dari setiap pemangku kepentingan yang terlibat. Pendidikan atau edukasi berpotensi menjadi ujung tombak peningkatan kualifikasi dari individu yang terlibat secara langsung maupun tak langsung dalam pengelolaan ekowisata di Siberut Selatan tersebut.

Saran ketiga atas tidak banyaknya pemangku kepentingan *Player* seperti Disparbudpora KKM, Balai TNS ataupun YPBM Muntei, menunjukkan bahwa masih banyak lembaga yang belum menyadari pentingnya dukungan dan pengaruh mereka dalam pengelolaan ekowisata di Siberut Selatan Kepulauan Mentawai. Pemangku kepentingan *player* berperan penting menentukan keberhasilan pengelolaan ekowisata di Siberut Selatan Guna meningkatkan kepentingan dan pengaruh dari para pemangku kepentingan, selain melakukan sosialisasi dan penyadaran, juga dapat dilakukan dengan bersinergi melakukan kerjasama atau kolaborasi sehingga dapat menguatkan keterlibatan mereka serta meningkatkan posisi menjadi *Player* atau pemangku kepentingan utama.

Saran untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan terkait dengan peran dan tantangan pemangku kepentingan kategori bisnis lokal dan komunitas dari masyarakat indigenous yang dalam penelitian ini banyak menduduki posisi *crowd*.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ackermann, F. & Eden, C. (2011). Strategic Management of Stakeholders: Theory and Practice. *Long Range Planning*, 44(3): 179-196.
- Alviya, I., Suryandari, E. Y., Maryani, R., & Muttaqin, M. Z. (2016). Meningkatkan Peran Pemangku kepentingan Dalam Pengelolaan Wilayah Hulu Daerah Aliran Sungai Ciliwung. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 13(2):121-134.
- Amoaka, G., Obuobisa-Darko, T., & Marfo, S. O., (2021). Stakeholder role in tourism sustainability: the case of Kwame Nkrumah Mausoleum and centre for art and culture in Ghana. *International Hospitality Review*, 2021: 1-33.

- Bryson, J. M., Patton, M. Q. & Bowman, R. A. (2011). Working With Evaluation Stakeholders: A Rationale, Step-Wise Approach and Toolkit. *Evaluation and Program Planning*, 34(1): 1-12.
- Czernek, K. (2013). Determinants of cooperation in a tourist region. *Annals of Tourism Research*, 40, 83-104
- Dabphet, S. (2012). *The Key Pemangku Kepentinganin The Implementation of Sustainable Tourism Development in Two Rural Towns of Thailand*. Thailand: Naresuan University.
- Dabphet, S., Scott, N. & Ruhanen, L. (2012). Applying Diffusion Theory to Destination Stakeholder Understanding of Sustainable Tourism Development: A Case From Thailand. *Jurnal of Sustainable Tourism*, 20 (8): 1-18.
- Daniel, B.K & Horsburg, B. (2009). Stakeholders Analysis as a Research Methodology for Development of a Distributed Community of Practice for Health Research and Innovation: A Proof of a Concept. *Conference: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education*, 2500-2505
- Eidt, C. M, Pant, P. M. & Hickey, G. M. (2020). Platform, Participation, and Power: How Dominant and Minority Pemangku Kepentinganans Shape Agricultural Innovation. *Sustainability*, 12: 461-469.
- Freeman, R. E. 2010. *Strategic Management: A Stakedholder Approach*. New York: Cambridge University Press.
- Ginige, K., Amaratungab, A. & Haigh, R., (2018). Mapping Stakeholders Associated With Societal Challenges: A Methodological Framework. *Procedia Engineering*, 212: 1195–1202.
- Graci, S. (2013). Collaboration and Partnership Development for Sustainable Tourism. *Tourism Geographies*, 15(1): 25–42.
- Hidayat, W. K., Anggoro, S. & Najib (2020). Management of Coastal Areas with Sustainable Marine Ecotourism Development in Purworejo Regency, Central Java, Indonesia. *Advance Sustainable Science, Engineering and Technology*, 2(1).
- Hieu, V.M. & Rašovská, I.(2018). A Proposed Model on Stakeholders Impacting on Destination Management As Mediator to Achieve Sustainable Tourism Development. *Trendy v podnikání - Business Trends*, 8(1): 90-102.
- Krce, M. B., Razović, M. & Klarin, T. (2016). Management of Sustainable Tourism Destination Through Stakeholder Cooperation. *Management: Journal of Contemporary Management Issues*, 21(2): 99-120.
- Li, Y., Lau, C., & Su, P. (2017). Heritage Tourism Stakeholder Conflict: A Case of a World Heritage Site in China. *Journal of Tourism and Cultural Change*, 18:1-21.
- Marlina, Sumarmi, Astina, I.K. (2020). Sustainable Marine Ecotourism Management: A Case of Marine Resource Conservation Based On Local Wisdom of Bajo Mola Community In Wakatobi National Park. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 32(4): 1317-1323.
- Marzuki, A., & Hay, I. (2016). *Stakeholders*. Switzerland: Springer International Publishing.
- Melo, R.H., Kusmana., Eriyatno, & Nurrochmat, D.R. (2019). Stakeholder Analysis of Sustainable Mangrove

- Management in Kwandang, Sub-district of North, Gorontalo District. *ISenREM, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*, 399 012071
- Nabiha, A.K.S. & Saad, N.H.M. (2015). Tourism Planning and Stakeholders' Engagement: The Case of Penang Island. *Problems and Perspectives in Management*, 13(2): 269–276.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6 Tahun 2017 Tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005-2025*.
- Pristiwasa, IWTK (2018). Pengembangan Ekowisata Taman Nasional Siberut di Kepulauan Mentawai. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 3(2),134–144.
- Pulido, F. J. I., & Merinero, R. (2018). Destinations' Relational Dynamic and Tourism Development. *Journal of Destination Marketing & Management*, 7: 140-152.
- Pundi Sumatra. 20 September 2021. Organizing Mentawai Toursm by using the Ecotourism Concept. Diakses Pada 25 Desember 2021, dari <https://pundisumatra.or.id/en/menata-pariwisata-mentawai-dengan-konsep-ekowisata/>
- Rahmanita, M. (2019). Assessing Visitor Spending at an Attraction, The Case of Yogyakarta Palace. *Bridging Tourism Theory and Praticce*, 11: 161-173.
- Rahmanita, M., Asmaniati,F., Nurbaeti, Dewi, T.R., & Rahmitasari, N. (2021). Forest Conservative Lifestyle of Mentawai Shaman (Sikerei): Indigenous enrichment to the education value of ecotourism in South Siberut, Mentawai, West Sumatra, Indonesia. *The Singapore Management Journal*, 9(1): 75-88.
- Ramírez, F., & Santana, J. (2019). *Environmental Education and Ecotourism*. Switzerland: Springer International Publishing.
- Reed et al. (2009) Who's in and why? A typology of Pemangku kepentingan Analysis Methods for Natural Resource Management. *Journal of Environmental Management*, 90: 1933-1949.
- Siti-Nabiha, A. K., & Saad, N. H. Md. (2015). Tourism Planning and Stakeholders' Engagement: The Case of Penang Island. *Problems and Perspectives in Management*, 13(2): 269-276.
- Salman, A., Jaafa, M., Mohamad, D., & Malik, S. (2021) Ecotourism development in Penang Hill: A Multi-Pemangku kepentingan Perspective Towards Achieving Environmental Sustainability. *Environmental Science and Pollution Research*, 28(31): 42945–42958.
- Taman Nasional Siberut (2021) Taman Nasional Siberut Kepulauan Mentawai Sumatera Barat. Diakses Pada 26 Maret 2020, dari <https://www.tamannasionalsiberut.org/2021/03/pulau-siberut-terletak-di-lepas-pantai.html>.
- The International Ecotourism Society. (2018). What is Ecotourism?. Diakses Pada 2 November 2020, dari <http://www.ecotourism.org/what-is-ecotourism>.
- Vrontis, D., Christofi, M., Giacosa, E.& Serravalle, F. (2021). Sustainable Development in Tourism : A Stakeholder Analysis of The Langhe Region. *Journal of Hospitality & Tourism Research*, XX (X): 1-33
- Wiharso, Ernik Yuliana, E. & Supriono, E. (2020). Pengelolaan Ekowisata Mangrove Berdasarkan Daya Dukung Ekosistem Dan Persepsi Masyarakat. *Jurnal Matematika*,



- Sains, dan Teknologi*, 21(1): 48-60.
- Wondirad, A. (2017). Who Benefits from The Ecotourism Sector in Southern Ethiopia?. *International Journal of Tourism Sciences*, 1-22.
- Wondirad, A., Tolkach, D., & King, B. (2020). Pemangku kepentingan Collaboration As A Major Factor For Sustainable Ecotourism Development in Developing Countries. *Tourism Management*, 78: 1-43.
- Woo, E., Uysal, M., & Sirgy, M. J. (2016). Tourism Impact and Pemangku Kepentingan's Quality of Life. *Journal of Hospitality & Tourism Research*, XX(X): 1-27.
- Xiaoyu, Duan & Shuhui Yang (2020) Discussion on Ecotourism Management of Giant Panda National Park in China. *E3S Web of Conferences* 143.
- Yodsuwan, C., & Butcher, K. (2012). Determinants of tourism collaboration member satisfaction in Thailand. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 17(1): 63-80.